

Dari Revolusi ke Reformasi: Analisis Perbandingan Administrasi Publik dan Konstitusi di China dan Rusia

Tri Wulandari¹, M. Rafli Abdimas², Diva Miranda³, Avin Octavia⁴, Afif Ramadhan⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Muhammadiyah Jakarta

E-mail: wuldarri@gmail.com¹, raflym890@gmail.com², divamrnda@gmail.com³,
avinoctavia17@gmail.com⁴, afiframadhan913@gmail.com⁵

Article History:

Received: 28 Juni 2024

Revised: 08 Juli 2024

Accepted: 10 Juli 2024

Keywords:

Public Administration,
Administrative Structure,
Political System

Abstract: *Administering public affairs and constitutions in China and Russia differ significantly. China operates under a communist-democratic system dominated by the Communist Party, characterized by a centralized administrative structure. In contrast, Russia transitioned from the Soviet regime to a multiparty political system with a market economy led by a presidential system. A literature review method was employed to analyze relevant sources such as books and journals to understand these differing administrative and constitutional systems. The findings reveal that China vertically integrates its political structure under the dominance of the Communist Party, while Russia exhibits a multi-party political dynamic focused on presidential executive power. This comparison provides insights into how governmental structure and constitution influence political stability and administrative effectiveness in both countries, pertinent to complex international governance and public policy frameworks.*

PENDAHULUAN

Negara adalah organisasi yang memiliki otoritas tertinggi, keabsahan, dan pengakuan dari rakyat. Suatu bangsa terdiri dari beberapa elemen utama, termasuk wilayah, pemerintahan, rakyat, dan pengakuan atau kedaulatan. Manajemen adalah proses di mana dua orang atau lebih bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama, sementara perbandingan merupakan evaluasi antara dua hal atau lebih satu sama lain. Administrasi komparatif adalah studi yang membandingkan administrasi dari dua negara atau lebih, mengingat bahwa setiap negara memiliki cara unik dalam mengelola pemerintahan mereka, sudut pandang mereka terhadap administrasi pun berbeda-beda. Semua perbandingan ini didasarkan pada perbedaan-perbedaan tersebut, yang dilakukan untuk memahami berbagai jenis organisasi pemerintahan dan tindakan yang mereka ambil untuk mencapai tujuan nasional. Administrasi nasional memiliki arti kolektif, dengan sistem pelayanan publik yang diawasi dan diatur oleh pemerintah negara bagian. Rakyat secara garis besar mengontrol kekuasaan negara dengan memanfaatkan kemampuan, sarana, dan sumber daya aparatur negara untuk mencapai fungsi-fungsi negara (Sahya Anggara, 2012).

China memiliki sejarah panjang dalam pemerintahan terpusat, dari pemerintahan pusat

hingga pemerintahan daerah yang terdiri dari enam tingkat. Saat ini, Tiongkok menerapkan kebijakan "satu negara, dua sistem" yang berbasis pada dua ideologi atau prinsip yang berbeda.

China memiliki tiga struktur politik utama yang terintegrasi secara vertikal. Partai Komunis China, bekas Pemerintahan Nasional, dan Bagian Dewan Negara yang mengurus urusan negara atau pemerintahan merupakan bagian integral dari struktur politik China. Negara Rakyat adalah salah satu dari dua institusi politik terpenting di China. Sistem politiknya terdiri dari dua bagian, yaitu suprastruktur yang mencakup lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta infrastruktur yang melibatkan partai politik, kelompok kepentingan, media politik, dan kelompok penekan.

Partai Komunis China, yang juga dikenal sebagai Partai Komunis China, memiliki kekuasaan yang sangat besar karena merupakan satu-satunya partai yang berkuasa di pemerintahan. Selain itu, praktik sosialisme pasar yang unik di China terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa negara ini, yang merupakan hasil dari gagasan reformis Deng Xiaoping. Langkah-langkah seperti akses formal ke WTO pada tahun 2001 dan kemajuan signifikan dalam pembangunan ekonomi telah membuat China menjadi tujuan investasi asing yang sangat populer secara internasional.

Namun, Russia, resmi dikenal sebagai "Rossiyskaya Federatsiya" (Federasi Rusia), memiliki wilayah terluas di dunia dengan luas 17.075.200 km², membentang dari Eropa Timur hingga Asia Utara. Setelah runtuhnya Uni Soviet dan kemerdekaan Rusia pada tahun 1991, negara ini menjadi sebuah republik semi-presidensial dengan badan eksekutif yang terdiri dari presiden dan perdana menteri. Sistem politik Rusia mencakup sistem parlementer dengan pemilihan parlemen berbasis representasi proporsional. Infrastruktur politik Rusia meliputi cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta partai politik, kelompok kepentingan, dan media massa (Wati et al., 2023).

Dalam konteks politik komparatif yang diperkenalkan oleh Aristoteles, administrasi publik komparatif merupakan bidang studi yang relatif baru. Studi ini dimulai sebagai bagian dari ilmu pemerintahan pada awal abad ke-20 dan mendapat perhatian signifikan saat Robert E. Dahl (1947) menekankan pentingnya selama Perang Dunia II. Konferensi Princeton tahun 1952 menjadi momentum penting dalam mengembangkan pendekatan sistematis terhadap perbandingan sistem pemerintahan dalam penelitian dan pendidikan (Laksono et al., 2023).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan perbandingan mendalam antara administrasi publik dan konstitusi di China dan Rusia. Kedua negara ini memiliki sejarah politik dan administrasi yang kaya dan berbeda, dipengaruhi oleh ideologi, sistem pemerintahan, dan perkembangan sejarah yang unik. China, sebagai negara dengan sistem komunis-demokratis, dan Rusia, yang mengalami transisi dari rezim Soviet ke demokrasi kapitalis, menawarkan perbandingan yang menarik dalam konteks administrasi publik dan konstitusi.

China, dengan Partai Komunis sebagai pilar utama dalam sistem politiknya, memiliki struktur administrasi yang terpusat dan kuat. Di sisi lain, Rusia, setelah runtuhnya Uni Soviet, mengalami transformasi politik yang mencakup perubahan signifikan dalam konstitusi dan sistem administrasinya. Perbandingan ini penting untuk memahami bagaimana kedua negara mengatur kehidupan masyarakat luas, memajukan kepentingan nasional, dan melindungi hak-hak warganya melalui sistem administrasi publik dan landasan konstitusional mereka.

Dengan mempertimbangkan perbedaan dalam konteks historis, politik, sosial, dan ekonomi, analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana struktur pemerintahan dan konstitusi mempengaruhi stabilitas politik dan efektivitas administrasi di China dan Rusia. Penelitian ini juga relevan dalam konteks hubungan internasional, kebijakan

publik, dan pengembangan sistem pemerintahan di negara-negara dengan latar belakang politik yang kompleks dan beragam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena atau kondisi di mana data yang dikumpulkan berupa kata kunci dan teks. Menurut Danial dan Warsiah, studi literatur adalah jenis penelitian di mana peneliti mengumpulkan banyak buku dan sumber lain yang terkait dengan subjek dan tujuan penelitiannya.

Metode ini digunakan untuk menyediakan dasar referensi dalam mendiskusikan hasil penelitian dengan menghadirkan berbagai teori yang relevan terkait masalah yang sedang diteliti. Burhan Bungin menjelaskan bahwa studi literatur merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian sosial yang digunakan untuk melacak data historis. Dengan demikian, studi literatur dapat dianggap sebagai upaya untuk menemukan referensi teori yang relevan dengan kasus atau masalah yang sedang dibahas. Referensi ini dapat ditemukan dalam buku, jurnal, artikel, laporan penelitian, dan berbagai situs web di internet. Hasil dari penelitian literatur ini adalah akumulasi referensi yang relevan untuk merumuskan masalah yang sedang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Administrasi Publik Negara China dan Rusia

Sejak diberlakukannya program reformasi pada tahun 1978, China telah mengalami perubahan besar yang mencakup semua aspek utama masyarakatnya. Contohnya, dalam praktik administratif, negara telah beralih dari kontrol menuju tata kelola yang lebih baik; pejabat dan pegawai pemerintah kini dilatih secara profesional. Sejak waktu tersebut, terjadi kemajuan pesat dalam pengembangan kelembagaan dan pencapaian sosial ekonomi. Meskipun demikian, hal ini masih menjadi wilayah yang kurang dipahami oleh pihak luar. Secara umum, keberhasilan ekonomi China dapat diatribusikan pada berbagai faktor, termasuk inovasi kelembagaan, manajemen kinerja, dan insentif yang efektif.

Dalam konteks Administrasi Publik (PA), terjadi transformasi dan ekspansi yang signifikan sejak periode ini. PA di China, meskipun memiliki sejarah yang relatif pendek dibandingkan dengan negara maju dan bahkan negara berkembang lainnya, telah mengalami perkembangan yang pesat. Sebagai perbandingan, teori Administrasi Publik (PA) mulai diperkenalkan ke China pada tahun 1930-an, tetapi pada awalnya hanya sebatas pengenalan. Setelah berdirinya Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1949, kurangnya pemahaman tentang penelitian akademis mengakibatkan penghapusan departemen PA di lembaga pendidikan tinggi, mirip dengan banyak disiplin ilmu sosial lainnya. Pidato yang terkenal dari Deng Xiaoping pada tahun 1979 memberikan dorongan yang signifikan bagi revitalisasi dan perkembangan PA di China. Hal ini secara langsung mendukung kebangkitan pesat PA di negara tersebut.

Keajaiban ekonomi China dalam tiga dekade terakhir dapat disebabkan oleh banyak faktor. Transisi dari ekonomi terencana ke ekonomi pasar menggerakkan inisiatif dan memicu semangat seluruh entitas untuk pertumbuhan ekonomi, membangunkan apa yang disebut Napoleon sebagai "raksasa tidur". Insentif yang kuat berdasarkan keuntungan pribadi, dikombinasikan dengan strategi manajemen seperti kontrak kinerja, mengarahkan kembali masyarakat China menuju kemakmuran. Populasi yang besar dengan distribusi regional yang kompleks dan tidak merata, meskipun mungkin dianggap sebagai kerugian dalam pengertian pertumbuhan tradisional, justru menjadi keuntungan dalam perbandingan komparatif.

Pada Juli 1985, jurnal nasional China dalam bidang Administrasi Publik, Administrasi Publik China, diluncurkan. Dua tahun kemudian, universitas-universitas mulai membuka kembali

departemen Ilmu Politik yang sebelumnya ditutup, beberapa di antaranya kemudian berubah menjadi departemen Ilmu Politik dan Administrasi Publik. Pada Oktober 1988, sebuah asosiasi akademis nasional, Masyarakat Administrasi Publik China, dibentuk dengan persetujuan Pemerintah Pusat. Pada tahun 1994, Dewan Negara mendirikan Sekolah Administrasi Nasional China, yang bertugas melatih eksekutif senior (Ma, L., & Wu, J., 2016).

Sejarah sistem administrasi publik di Rusia telah mengalami perubahan yang signifikan melalui berbagai zaman. Pada era Feodal Rusia sebelum invasi Tatar-Mongol pada abad ke-13, pangeran-pangeran lokal memimpin dengan sistem upeti dan *druzhina* mereka untuk melindungi masyarakat dari serangan musuh. Pada abad ke-16, Ivan yang Agung membentuk *Zemsky Sobor* sekitar tahun 1549, menciptakan bentuk awal pemerintahan yang mewakili berbagai kepentingan dari seluruh wilayah Rusia. Era Kekaisaran Rusia di bawah Peter the Great pada awal abad ke-18 menyaksikan modernisasi besar dalam administrasi publik dengan pendirian *collegium* (kementerian) dan reformasi birokrasi. Revolusi Bolshevik pada tahun 1917 mengubah sistem menjadi Soviet yang sentralistik, di mana Partai Komunis mengendalikan pemerintahan dengan birokrasi yang otoriter. Setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, Federasi Rusia memasuki era modernisasi administrasi publik dengan adopsi sistem presidensial-semi presidensial, menandai perubahan signifikan menuju representasi publik yang lebih langsung dan transparansi dalam pemerintahan (Manaev, G. 2019).

Perbandingan Struktur Konstitusi dan Administrasi Publik China dan Rusia

Negara adalah suatu entitas atau otoritas tertinggi yang diberi wewenang untuk mengatur masalah-masalah yang mempengaruhi kepentingan masyarakat secara luas. Selain itu, negara memiliki tanggung jawab untuk memajukan, melindungi, dan mendidik kehidupan warga negaranya. Menurut Profesor Farid, negara adalah wilayah merdeka yang diakui oleh negara lain dan memiliki kedaulatan. China adalah sebuah republik dengan sistem demokrasi komunis. Dengan luas wilayah 9.597.000 kilometer persegi dan populasi sekitar 1,386 miliar jiwa, China terdiri dari 23 provinsi dan dua wilayah otonom khusus, Hong Kong dan Makau. China kaya akan tradisi dan budaya unik, termasuk Taoisme, Buddha, kaligrafi, kuliner, pakaian, dan bahasa.

Administrasi publik di China didasarkan pada sejarah administrasi terpusat yang terdiri dari enam tingkat, yang mengelola kekuasaan pemerintahan dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Saat ini, China menerapkan prinsip "satu negara, dua sistem", yang mengatur sistem sosialis di daratan China dengan sistem kapitalis yang berlaku di Hong Kong dan Taiwan.

Struktur politik China terintegrasi secara vertikal dengan Partai Komunis China sebagai kekuatan utama yang mengendalikan pemerintahan negara dan Kongres Rakyat Nasional sebagai lembaga legislatif utama. Pertumbuhan ekonomi China yang cepat sejak dilakukannya reformasi oleh Deng Xiaoping didorong oleh penerapan sosialisme pasar, menjadikannya destinasi utama bagi investasi asing setelah bergabung dengan WTO pada tahun 2001.

Rusia, secara resmi bernama *Rossiyskaya Federatsiya*, adalah negara terluas di dunia dengan luas wilayah mencapai 17.075.200 km², membentang dari Eropa Timur hingga Asia bagian utara. Setelah Uni Soviet runtuh pada tahun 1991, Rusia menjadi negara independen yang menganut sistem presidensial republik semi-presidensial. Sistem politik Rusia mengikuti model parlementer dengan pemilihan parlemen berdasarkan representasi proposional.

Struktur politik Rusia mencakup badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta melibatkan partai politik, kelompok kepentingan, dan media massa sebagai bagian dari infrastruktur politiknya. Administrasi negara Rusia, seperti halnya negara lainnya, mengelola seluruh fungsi pemerintahan dengan memanfaatkan sumber daya dan kemampuan aparatur

negara yang tersedia. Perbandingan antara administrasi publik China dan Rusia menyoroti perbedaan dalam sistem politik, struktur pemerintahan, dan implementasi ideologi yang mempengaruhi tata kelola negara masing-masing.

Konstitusi Negara China

Konstitusi nasional China, yang dikenal sebagai Konstitusi Republik Rakyat China, merupakan dokumen hukum paling tinggi di negara tersebut. Disahkan pertama kali pada tanggal 4 Desember 1982, konstitusi ini menggantikan versi sebelumnya dari tahun 1954, 1975, dan 1978. Konstitusi ini membentuk struktur pemerintahan dengan Kongres Rakyat Nasional sebagai lembaga legislatif utama, Presiden sebagai kepala negara, dan Dewan Negara sebagai badan eksekutif tertinggi.

Partai Komunis China (PKC) memiliki peran sentral dalam pemerintahan dan kebijakan nasional. Konstitusi menegaskan bahwa China dipimpin oleh Partai Komunis, yang mengawasi seluruh lembaga negara dan pemerintahan. Konstitusi menjamin berbagai hak asasi manusia dan kebebasan, termasuk hak untuk pekerjaan, pendidikan, dan kehidupan sosial serta ekonomi yang adil. Namun, dalam praktiknya, implementasi hak-hak ini sering diatur dan dibatasi oleh pemerintah.

Konstitusi China telah mengalami beberapa amendemen, dengan amendemen terakhir pada tahun 2018. Perubahan tersebut mencakup penghapusan batasan masa jabatan presiden, yang memungkinkan seorang presiden untuk menjabat lebih dari satu periode lima tahun. Konstitusi menekankan bahwa kekuasaan berasal dari rakyat, dengan Kongres Rakyat Nasional sebagai perwakilan rakyat yang memiliki otoritas tertinggi dalam membuat undang-undang, mengawasi pelaksanaannya, dan membuat keputusan penting bagi negara.

Konstitusi tersebut menetapkan bahwa China adalah negara sosialis dengan karakteristik khas China, yang menandakan bahwa pembangunan ekonomi dan sosial harus sesuai dengan prinsip-prinsip sosialis yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan unik China. Konstitusi China mencerminkan kombinasi ideologi sosialis, dominasi Partai Komunis, serta upaya untuk mempertahankan stabilitas politik dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang cepat.

Konstitusi Negara Rusia

Konstitusi Rusia disahkan pada 12 Desember 1993. Konstitusi ini secara rinci mengatur dasar-dasar sistem konstitusional, hak dan kebebasan manusia, sistem federasi, posisi presiden federasi Rusia, badan legislatif federal, pemerintah federasi Rusia, sistem peradilan, dan pemerintahan otonom lokal. Di bawah konstitusi baru ini, presiden yang dipilih melalui pemungutan suara nasional memiliki wewenang yang signifikan. Sebagai kepala negara Rusia, presiden berwenang untuk menunjuk perdana menteri, hakim-hakim utama, dan anggota kabinet. Presiden juga memiliki peran sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata dan berhak mengumumkan keadaan darurat militer atau sipil. Ketika legislatif tidak berhasil meloloskan inisiatif legislasi, presiden dapat mengeluarkan keputusan yang memiliki kekuatan hukum.

Konstitusi baru ini menetapkan Majelis Federal sebagai badan legislatif negara, terdiri dari Dewan Federasi (majelis tinggi yang terdiri dari perwakilan yang ditunjuk dari masing-masing divisi administratif Rusia) dan Duma Negara (majelis rendah yang dipilih dengan 450 anggota). Selain itu, konstitusi Rusia memberikan sejumlah kekuasaan kepada pemerintah regional dan otonom. Utusan presiden di daerah memiliki wewenang untuk menerapkan undang-undang federal dan mengkoordinasikan antara presiden dan gubernur regional.

Bentuk Negara

China, atau Republik Rakyat China (RRC), adalah negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik. Sistem politik China menganut prinsip kabinet parlementer. Presiden memegang peran sebagai kepala negara, walaupun perannya lebih bersifat seremonial, namun memiliki wewenang yang signifikan dalam situasi tertentu. Di sisi lain, Perdana Menteri bertanggung jawab sebagai kepala pemerintahan yang mengawasi implementasi kebijakan dan administrasi sehari-hari.

Struktur administratif China terdiri dari beberapa tingkatan, termasuk provinsi, kota setingkat provinsi, daerah otonom, dan kota setingkat prefektur. Meskipun terdapat daerah otonom dan daerah administratif khusus dengan kekuasaan politik dan administratif tertentu, semua entitas ini berada di bawah pengawasan langsung pemerintah pusat di Beijing. Saat ini, China terbagi menjadi 23 provinsi dan 2 daerah otonom khusus, yaitu Hong Kong dan Makau, yang memiliki otonomi khusus dalam menjalankan sistem pemerintahan mereka, kecuali dalam kebijakan luar negeri, keamanan nasional, dan kepemimpinan yang dipilih secara terpusat, dengan tujuan utama menjaga stabilitas dan kekuasaan Partai Komunis China atas China.

Dalam konteks kebijakan ekonomi, pemerintah China memberlakukan reformasi yang transparan untuk meningkatkan efisiensi ekonomi dan memberikan manfaat ekonomi yang maksimal kepada masyarakat. Meskipun demikian, kontrol pemerintah pusat terhadap ekonomi China dapat menjadi lemah sebagai dampak dari desentralisasi kekuasaan dan pemberdayaan pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalam Konstitusi China Pasal 3 Ayat 4 yang menetapkan kewenangan lembaga negara dalam mengelola wilayah yang berada di bawah naungannya.

Rusia, sebagai Federasi Rusia, memiliki bentuk pemerintahan republik semi-presidensial. Dalam sistem ini, presiden berperan sebagai kepala negara, sementara Departemen Luar Negeri mengatur kebijakan luar negeri. Meskipun presiden memainkan peran sentral dalam pemerintahan, Kongres juga memiliki wewenang penting.

Rusia terdiri dari berbagai entitas federal, termasuk republik, region (wilayah administratif), oblast (wilayah), kota federal, okrug otonom (daerah otonom), dan oblast otonom (wilayah otonom). Setiap subjek federal di Rusia memiliki tingkat otonomi yang berbeda-beda, namun semuanya diatur oleh konstitusi federal. Secara keseluruhan, China dan Rusia menunjukkan perbedaan dalam sistem politik, struktur pemerintahan, dan tingkat otonomi daerah, yang mencerminkan pendekatan yang unik terhadap tata kelola dan pembangunan negara masing-masing.

Bentuk dan Sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan Republik Rakyat China adalah sistem satu partai yang dipimpin oleh Partai Komunis China (PKC). PKC memiliki peran sentral dalam semua aspek pemerintahan dan kehidupan politik di China. Posisi tertinggi dalam PKC, yaitu Sekretaris Jenderal, tidak hanya menjadi pemimpin partai tetapi juga negara, sering kali menjabat sebagai Ketua Komisi Militer Pusat, yang merupakan posisi paling berkuasa di China.

Dalam Republik Rakyat China, kekuasaan negara dibagi antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, walaupun pengaruh utama tetap berada di tangan Partai Komunis China (PKC). Berikut adalah pembagian kekuasaan di China:

1. Lembaga Eksekutif

- a. Dewan Negara (State Council)**: Dipimpin oleh Perdana Menteri, Dewan Negara adalah lembaga eksekutif tertinggi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan administrasi sehari-hari pemerintahan. Dewan Negara terdiri dari

beberapa departemen dan komisi yang dipimpin oleh menteri dan pejabat tinggi lainnya.

- b. Presiden: Sebagai kepala negara, meskipun perannya lebih bersifat seremonial, Presiden dipilih oleh Kongres Rakyat Nasional (NPC) untuk masa jabatan lima tahun.

2. Lembaga Legislatif

Kongres Rakyat Nasional (National People's Congress, NPC): Merupakan badan legislatif tertinggi di China, NPC memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang, mengamandemen konstitusi, dan menetapkan kebijakan nasional. Anggota NPC dipilih melalui pemilihan tidak langsung yang diatur oleh PKC. Komite Tetap NPC bertugas mengelola urusan NPC di antara sesi-sesi tahunan dan bertindak sebagai badan legislatif penuh selama periode tersebut.

3. Lembaga Yudikatif

- a. Mahkamah Agung Rakyat (Supreme People's Court): Badan peradilan tertinggi dengan kewenangan untuk meninjau kembali keputusan pengadilan tingkat bawah, memastikan kepatuhan terhadap hukum dan konstitusi, serta menafsirkan undang-undang. Dipimpin oleh Ketua Hakim Agung yang ditunjuk oleh Kongres Rakyat Nasional (KRN).

- b. Pengadilan Rakyat Menengah dan Pengadilan Rakyat Dasar: Terletak di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, masing-masing menangani kasus pidana dan perdata dengan tingkat serius yang berbeda. Keputusan Pengadilan Rakyat Dasar dapat diajukan banding ke Pengadilan Rakyat Menengah, dan keputusan Pengadilan Rakyat Menengah dapat diajukan banding ke Mahkamah Agung Rakyat.

Sistem pemerintahan di Rusia melibatkan pemisahan kekuasaan menjadi tiga cabang utama:

- a. Kekuasaan Eksekutif

Kekuasaan eksekutif terdiri dari Presiden dan struktur bawahannya seperti Perdana Menteri, menteri, dan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia. Presiden memiliki wewenang luas untuk menunjuk pejabat dan pembantunya, termasuk Perdana Menteri dengan persetujuan Duma Negara.

- b. Kekuasaan Legislatif

Kekuasaan legislatif dikenal sebagai Majelis Federal atau Federal Assembly, yang merupakan parlemen nasional Rusia. Majelis Federal bertanggung jawab untuk membuat undang-undang untuk seluruh negara. Parlemen bersifat bikameral, terdiri dari dua kamar:

- 1) Duma Negara (The State Duma): Terdiri dari 450 anggota yang dipilih melalui pemilihan umum setiap lima tahun. Duma memiliki kekuasaan legislatif untuk membuat, mengubah, dan menyetujui undang-undang serta memiliki otoritas untuk menyatakan mosi tidak percaya terhadap perdana menteri.

- 2) Dewan Federasi (Federation Council): Terdiri dari 170 anggota yang mewakili subjek federasi Rusia. Dewan Federasi memiliki peran penting dalam menyetujui atau menolak undang-undang yang disahkan oleh Duma Negara. Dewan Federasi juga berperan dalam pengangkatan pejabat tinggi negara.

- c. Kekuasaan Kehakiman (Yudisial)

Kekuasaan kehakiman bertanggung jawab untuk menafsirkan dan menerapkan hukum di Rusia. Cabang kehakiman ini terdiri dari beberapa lembaga:

- 1) Mahkamah Konstitusi: Bertugas menguji konstitusionalitas undang-undang yang dibuat oleh legislatif dan dapat menyatakan tidak konstitusional.
- 2) Mahkamah Agung: Merupakan pengadilan tingkat terakhir yang mengatur struktur pengadilan dari tingkat regional hingga tingkat distrik dan pengadilan magistrat.
- 3) Mahkamah Arbitrase Tinggi: Berwenang memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan perjanjian, perbankan, obligasi, dan sengketa keperdataan lainnya.

Pemisahan kekuasaan ini merupakan landasan bagi sistem politik dan administratif Rusia, memastikan bahwa setiap cabang pemerintahan memiliki peran dan fungsi yang jelas dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan konstitusi dan undang-undang negara.

Sistem Politik Negara China dan Rusia

Sistem politik Republik Rakyat China mencakup beberapa elemen utama dalam suprastruktur politiknya:

- a. Partai Komunis China (PKC): PKC adalah partai tunggal yang mendominasi pemerintahan dan kehidupan politik di Tiongkok. Didirikan pada tahun 1921, PKC mengusung prinsip "sosialisme dengan karakter Tiongkok" yang menggabungkan prinsip-prinsip Marxisme dengan elemen ekonomi pasar dan nasionalisme Tiongkok. Partai ini memiliki lebih dari 90 juta anggota dan berperan sentral dalam modernisasi ekonomi Tiongkok serta dalam menjaga stabilitas politik.
- b. Kongres Rakyat Nasional (KRN): KRN atau National People's Congress (NPC) adalah badan legislatif tertinggi di Tiongkok yang bertanggung jawab atas pembuatan undang-undang, pengawasan kebijakan, dan pemilihan pejabat tinggi negara. Meskipun anggotanya berasal dari berbagai daerah, kelompok etnis, dan sektor masyarakat, kontrol utama tetap dipegang oleh PKC. KRN bekerja sama dengan PKC untuk memastikan kebijakan nasional sejalan dengan garis partai dan kepentingan nasional.
- c. Dewan Negara: Dewan Negara setara dengan kabinet di negara lain dan dipimpin oleh Perdana Menteri. Dewan ini terdiri dari 26 kementerian dan lembaga setingkat kementerian yang bertanggung jawab atas formulasi dan implementasi kebijakan pemerintah serta pengelolaan urusan ekonomi, sosial, dan budaya negara.
- d. Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok (KKPRT): KKPRT atau Chinese People's Political Consultative Conference (CPPCC) adalah badan penasihat politik utama di Tiongkok. Terdiri dari perwakilan dari delapan partai politik yang disetujui oleh PKC serta tokoh independen, profesional, dan akademisi, KKPRT memberikan nasihat dan saran kebijakan kepada PKC. Meskipun bukan bagian dari pemerintah formal, KKPRT bekerja erat dengan PKC untuk mengembangkan dan menyesuaikan kebijakan, memastikan konsultasi politik yang luas, dan memberikan pengawasan demokratis terhadap implementasi kebijakan/ Fungsi utama KKPRT meliputi memberikan nasihat politik, menyediakan platform konsultasi politik antara PKC dan masyarakat, serta mengawasi implementasi kebijakan pemerintah untuk memastikan kepentingan publik terpenuhi.

Suprastruktur Politik Rusia

Presiden adalah kepala negara dalam sistem politik Rusia dan memiliki peran dominan.

Dia memiliki wewenang untuk menunjuk perdana menteri, menerbitkan dekret, memimpin kebijakan luar negeri dan keamanan nasional, serta memiliki hak veto atas undang-undang. Presiden Rusia dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatan enam tahun dan dapat dipilih kembali.

Pemerintah Rusia, yang dipimpin oleh Perdana Menteri, bertanggung jawab atas administrasi sehari-hari. Perdana Menteri diangkat oleh presiden dan harus mendapat persetujuan dari Duma Negara. Majelis Federal Rusia terdiri dari dua kamar:

- a. Duma Negara (State Duma) adalah majelis rendah dengan 450 anggota yang dipilih melalui sistem campuran. Mereka bertugas membuat undang-undang, mengawasi pemerintah, dan menyetujui anggaran negara.
- b. Dewan Federasi (Federation Council) adalah majelis tinggi dengan 170 anggota, yang mewakili subjek federasi. Anggota Dewan Federasi dipilih oleh parlemen daerah dan gubernur. Dewan Federasi memiliki wewenang untuk menyetujui atau menolak undang-undang dari Duma Negara, menyetujui penggunaan angkatan bersenjata, dan mengubah perbatasan antar subjek federasi.
- c. Mahkamah Konstitusi Federasi Rusia adalah pengadilan tinggi yang memutuskan apakah undang-undang atau keputusan presiden bertentangan dengan Konstitusi Rusia. Mahkamah ini terdiri dari 19 hakim yang ditunjuk oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Federasi. Mahkamah Konstitusi dipimpin oleh seorang Ketua Hakim yang dipilih dari hakim-hakimnya.

Sistem politik Rusia mencerminkan kombinasi kontrol pusat yang kuat dengan struktur federal yang memberikan tingkat otonomi kepada subjek federasi. Meskipun konstitusi menjamin berbagai kebebasan politik dan sipil, implementasi praktis dari kebebasan ini sering kali dipengaruhi oleh dinamika politik dan kontrol pemerintah pusat.

Infrastruktur Politik China

Sistem partai tunggal China, dengan Partai Komunis China (PKC) sebagai satu-satunya partai politik yang sah, merupakan ciri khas pemerintahan negara tersebut. Sistem ini telah menjadi landasan politik dan ideologi China selama lebih dari tujuh dekade, memegang kendali atas semua aspek kehidupan politik, ekonomi, dan sosial. PKC memiliki struktur hierarkis kompleks dengan Kongres Nasional Rakyat sebagai badan pengambil keputusan tertinggi.

Sistem patronase di China mencakup berbagai bentuk yang masih ada dalam konteks kontemporer:

- a. Guanxi, atau jaringan hubungan pribadi yang saling menguntungkan, sangat penting dalam budaya dan bisnis China. Guanxi digunakan untuk mendapatkan akses ke sumber daya, peluang kerja, dan bantuan dari individu yang memiliki kekuasaan.
- b. Nepotisme melibatkan penunjukan kerabat atau teman dekat untuk posisi penting berdasarkan hubungan pribadi daripada kualifikasi.
- c. Korupsi melibatkan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, seperti suap atau penggelapan dana.
- d. Penyuapan terjadi ketika uang atau hadiah diberikan kepada pejabat untuk mempengaruhi keputusan atau mendapatkan keuntungan.
- e. Favoritisme yang memberikan perlakuan istimewa kepada individu berdasarkan hubungan pribadi daripada meritokrasi.

Ideologi Marxisme-Leninisme yang dianut oleh Republik Rakyat China menggabungkan pandangan filosofis, politik, dan ekonomi Karl Marx dan Vladimir Lenin. PKC menganut

Sosialisme dengan Karakteristik Tiongkok, mengadaptasi prinsip-prinsip sosialisme dengan elemen ekonomi pasar untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dan kesejahteraan sosial.

Pemerintahan sentralisasi di Republik Rakyat China mengacu pada struktur di mana kekuasaan dan otoritas utama dikendalikan oleh pemerintah pusat di Beijing. Meskipun ada beberapa desentralisasi untuk administrasi lokal, keputusan utama, kebijakan nasional, rencana pembangunan, anggaran, dan prioritas kebijakan utama ditetapkan oleh pemerintah pusat. Partai Komunis China memainkan peran utama dalam mengendalikan proses pengambilan keputusan dan kebijakan nasional, memastikan konsistensi dan stabilitas dalam penerapan kebijakan di seluruh negeri.

Infrastruktur Politik Rusia

Sejak runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, Rusia telah mengubah sistemnya dari sistem partai tunggal yang didominasi oleh Partai Komunis menjadi sistem multi-partai. Saat ini, lebih dari 70 partai politik terdaftar di Rusia, meskipun hanya beberapa yang memiliki pengaruh signifikan dalam politik nasional. Partai United Russia, yang didirikan oleh Presiden Vladimir Putin pada tahun 2001, telah mendominasi parlemen dan politik nasional.

Sistem oligarki di Rusia mengacu pada dominasi sejumlah kecil individu atau kelompok yang memiliki kekayaan dan kekuasaan besar yang mempengaruhi politik, ekonomi, dan kebijakan negara. Istilah "oligarki" digunakan untuk menggambarkan situasi di mana kekuasaan sebenarnya berada di tangan sekelompok kecil orang kaya atau elit bisnis. Oligarki di Rusia seringkali menggunakan hubungan patronase dengan pemerintah untuk memperoleh perlindungan dan akses ke kekuasaan politik dan ekonomi, serta untuk mendapatkan kontrak pemerintah dan keistimewaan lainnya.

Nasionalisme merupakan aspek penting dalam identitas dan politik Rusia, yang berkembang melalui sejarah panjang perubahan sosial, politik, dan ekonomi. Nasionalisme ini mempengaruhi kebijakan luar negeri Rusia yang sering kali agresif, terutama dalam hubungannya dengan negara-negara bekas Uni Soviet dan Barat.

Sistem federal di Rusia membagi kekuasaan politik antara pemerintah pusat dan entitas-entitas federal yang disebut "subjek federasi." Ini memberikan otonomi tertentu bagi masing-masing subjek federasi dalam urusan lokal mereka, sambil tetap berada di bawah kerangka hukum dan administratif yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Rusia terdiri dari 85 subjek federasi, termasuk 22 republik yang umumnya didasarkan pada etnis tertentu, 9 krai (teritori besar), 46 oblast (provinsi standar), 3 kota federal (Moskow, Saint Petersburg, dan Sevastopol), 4 okrug otonom, dan 1 oblast otonom.

Faktor Ekonomi China

Pertumbuhan ekonomi China selama beberapa dekade terakhir telah menarik perhatian global. Negara ini berhasil mengatasi banyak tantangan dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Kebijakan pemerintah China, seperti pembebasan pajak dan insentif lainnya, telah memberikan hasil signifikan. Saat ini, China menarik investasi dalam jumlah besar, dengan pabrik-pabrik dan investasi lainnya senilai ratusan miliar dolar mengalir ke negara ini. Pada tahun 2006, investasi asing mencapai \$69 miliar, terutama terkonsentrasi di Beijing, Shanghai, dan wilayah pesisir lainnya.

Pemerintah China juga aktif menarik investor asing untuk tujuan modernisasi, mendorong perusahaan asing untuk membawa teknologi terkini dan mengajarkan penggunaannya kepada tenaga kerja lokal. Ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan teknologi di dalam negeri, tetapi

juga memfasilitasi percepatan revolusi industri di masa depan.

Revitalisasi ekonomi China didasarkan pada reformasi sistem ekonomi untuk mencapai produksi dan alokasi sumber daya yang lebih efisien, serta strategi pertumbuhan yang bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur. China telah meluncurkan program investasi besar dalam infrastruktur fisik, seperti jaringan transportasi modern, pembangkit listrik tenaga air, dan jaringan telekomunikasi canggih. Langkah ini mempercepat urbanisasi, memperlancar mobilitas tenaga kerja, dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

Di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping sejak tahun 1978, China telah melaksanakan "empat rencana modernisasi" yang mencakup modernisasi pertanian, industri, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta militer. Langkah ini menjadi prioritas utama untuk mengatasi kelemahan ekonomi dan menghadapi tantangan kerapuhan negara.

Di sektor pendidikan, China telah mengimplementasikan program wajib belajar selama sembilan tahun sejak tahun 1986, yang signifikan dalam meningkatkan tingkat melek huruf menjadi 80% pada tahun 1990-an. Anggaran untuk pengembangan riset, yang sebelumnya kurang dari 1% dari PDB, kini telah meningkat menjadi 1,5% dan direncanakan akan terus meningkat hingga mencapai 2,5% pada tahun 2020. Ini telah mendorong inovasi ilmiah, seperti yang terlihat dari peningkatan permohonan paten yang signifikan.

Investasi dalam penelitian dan pengembangan (R&D) serta inovasi menjadi fokus penting China, yang berusaha untuk beralih dari model pertumbuhan berbasis biaya menjadi model berbasis pengetahuan. Melalui inisiatif seperti "Made in China 2025" dan "Rencana Aksi 2030 untuk Inovasi dan Transformasi Sains dan Teknologi," China berharap untuk menciptakan keunggulan kompetitif di sektor-sektor strategis seperti kecerdasan buatan, teknologi informasi, bioteknologi, dan energi baru. Langkah ini juga termasuk peningkatan perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) dan kerjasama dengan pihak asing dalam inovasi dan teknologi.

Strategi "One Belt One Road" (BRI) menjadi bagian integral dari upaya China untuk memperluas pengaruh ekonominya secara global. Melalui inisiatif ini, China berharap untuk membangun jaringan infrastruktur dan konektivitas dengan lebih dari 70 negara di Asia, Eropa, dan Afrika, meningkatkan perdagangan, investasi, dan kerjasama ekonomi serta membuka peluang baru bagi perusahaan China di pasar internasional. Dengan demikian, kebijakan pemerintah China telah berhasil membawa hasil yang nyata bagi masyarakatnya, memungkinkan transfer teknologi dan produk industri China untuk bersaing secara global.

Faktor Ekonomi Rusia

Salah satu faktor pertumbuhan ekonomi Rusia adalah Ketergantungan Rusia pada sektor energi, terutama industri minyak dan gas, memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan anggaran negara. Namun, hal ini juga membuat ekonomi Rusia rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global. Untuk mengurangi risiko yang terkait dengan ketergantungan ini, diversifikasi ekonomi menjadi sangat penting bagi Rusia.

Rusia melakukan perdagangan internasional melalui aktivitas impor dan ekspor. Aktivitas ekspor Rusia terus meningkat secara stabil selama dekade terakhir. Pada tahun 2020, ekspor meningkat sebesar 72% menjadi \$45,93 miliar. Perekonomian Rusia sangat bergantung pada komoditas ekspor seperti minyak mentah, minyak bumi, dan gas alam.

Nilai impor Rusia juga meningkat dari \$22 miliar pada tahun sebelumnya menjadi \$24,75 miliar pada tahun 2022. Produk yang diimpor oleh Rusia mencakup kategori mesin, reaktor nuklir, dan boiler, dengan produk kelistrikan menyumbang sebesar 19%.

Rusia memiliki cadangan devisa yang dikelola sebagai aset eksternal oleh bank sentral

negara. Cadangan devisa ini dapat berupa mata uang tertentu atau emas. Selain itu, pemerintah juga memiliki hak penarikan khusus dan kepemilikan atas surat berharga dalam mata uang asing, termasuk obligasi pemerintah, obligasi korporasi, saham, dan pinjaman mata uang asing.

Pengaruh Struktur Pemerintahan terhadap Stabilitas Politik di China dan Rusia

Politik negara China lebih kepada sistem kepartaian, China merupakan negara komunis sehingga terdapat satu partai yang sangat berkuasa baik pemerintahan mau pun politik yaitu partai komunis China (PKC). Hal ini menyebabkan sistem pemilihan umum di China diatur oleh Partai Komunis China dengan menganut sistem Secret ballot dan seluruh proses pemilihan diatur dalam satu hukum. Sistem kepartaian di China berbeda dengan sistem persaingan dua partai atau multi-partai di negara-negara Barat. China menerapkan sistem kerja sama multipartai dan musyawarah politik di bawah pimpinan Partai Komunis China. Sistem kepartaian ini ditegakkan dan dikembangkan oleh Partai Komunis China dan partai-partai demokratis dalam praktek revolusi, pembangunan dan reformasi dalam waktu panjang, dan merupakan suatu sistem politik dasar di China zaman sekarang.

Ciri sistem politik di China itu adalah kerja sama multi partai di bawah pimpinan Partai Komunis China. China memiliki struktur utama politik yang terintegrasi secara vertical yaitu; a. partai komunis China, b. pemerintah negara bagian (negara atau pemerintah) aparat yang memimpin dewan negara. Dua Lembaga utama yang berperan dalam politik China salah satunya adalah Nasional Rakyat Congress (NRC). Di dalam sistem politik terdapat dua hal yaitu suprastruktur yang meliputi badan eksekutif, legislatif dan yudikatif, sedangkan infrastruktur meliputi partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan dan media politik. Partai komunis China (Chinese Communist Party) merupakan partai yang memiliki pengaruh yang sangat kuat karena mereka merupakan kekuatan partai tunggal dalam pemerintahan (Wati, R., dkk 2023).

Pengaruh struktur pemerintahan terhadap stabilitas politik di China sangat dipengaruhi oleh dominasi Partai Komunis China (PKC) yang kuat. Dengan sistem politik yang terpusat di sekitar PKC, China mengalami stabilitas politik yang relatif tinggi karena kekuatan partai tunggal yang mengendalikan proses politik dan pemerintahan secara menyeluruh. Sistem ini mengatur proses pemilihan umum dan politik dalam kerangka hukum yang dikendalikan oleh PKC, termasuk sistem secret ballot yang diterapkan dengan ketat.

Selain itu, struktur politik China juga mencakup kerja sama multipartai di bawah kepemimpinan PKC, yang memungkinkan partisipasi partai-partai lain dalam musyawarah politik, meskipun PKC tetap menjadi kekuatan dominan. Nasional People's Congress (NPC) sebagai lembaga utama legislatif di China, bersama dengan badan eksekutif dan yudikatif, menunjukkan integrasi vertikal dari struktur politik China yang mencerminkan kontrol yang ketat dari PKC terhadap kebijakan dan arah politik negara.

Dengan demikian, meskipun sistem politik China mengandalkan kerja sama multipartai di bawah kendali PKC, dominasi partai tunggal ini telah memberikan stabilitas politik yang kuat namun juga menimbulkan tantangan terkait dengan pluralisme politik dan partisipasi publik yang lebih luas dalam proses politik nasional.

Struktur pemerintahan Rusia telah mengalami transformasi yang signifikan sejak runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991. Dari sistem yang didominasi oleh Partai Komunis dengan kontrol total atas kehidupan politik dan ekonomi, Rusia bergerak menuju sistem politik multipartai dan ekonomi pasar bebas di bawah kepemimpinan Boris Yeltsin. Pembentukan konstitusi baru pada tahun 1993 menetapkan landasan hukum untuk sistem konstitusional, hak asasi manusia, dan

otonomi daerah. Kekuasaan presiden juga diperkuat dengan wewenang untuk menunjuk perdana menteri, anggota kabinet, dan hakim kunci, serta mengumumkan keadaan darurat militer. Meskipun demikian, era Vladimir Putin menandai pergeseran menuju konsep "Sovereign Democracy" yang menggabungkan elemen demokrasi dengan kontrol yang lebih ketat atas kekuasaan eksekutif. Hal ini mencerminkan dinamika politik Rusia yang kompleks, termasuk peran oligarki dalam ekonomi negara dan tantangan sosial yang terus berkembang (Rizqianto, R. 2023).

Pengaruh struktur pemerintahan terhadap stabilitas politik di Rusia sangat signifikan. Dengan adanya konstitusi yang memberikan kekuasaan eksekutif yang besar kepada presiden, seperti yang diamandemen pada tahun 2008 untuk memperpanjang masa jabatan presiden, Rusia mengalami konsentrasi kekuasaan yang dapat memberikan stabilitas dalam pengambilan keputusan. Namun, hal ini juga berpotensi mengurangi checks and balances di dalam sistem politik, memperkuat dominasi satu tokoh politik atau partai, seperti yang terjadi dengan Vladimir Putin. Selain itu, struktur federal yang memberikan otonomi besar kepada subjek federal dapat mempengaruhi dinamika politik antara pemerintah pusat dan daerah, yang juga berperan penting dalam stabilitas politik. Meskipun terdapat partisipasi politik yang formal melalui sistem multipartai, realitas politik di Rusia sering kali mencerminkan pengaruh yang besar dari elite politik tertentu, yang dapat mempengaruhi stabilitas politik jangka panjang dengan cara yang kompleks dan sering kali terprediksi.

KESIMPULAN

Perbandingan administrasi publik dan konstitusi antara China dan Rusia mencerminkan perbedaan yang mencolok dalam pendekatan sistemik dan struktur pemerintahan. China, dengan sistem politik yang didominasi oleh Partai Komunis China, mengintegrasikan kekuasaan politik secara vertikal dari pemerintah pusat hingga daerah, menekankan stabilitas melalui kontrol ketat atas proses politik dan pemilihan umum. Konstitusi China memperkuat supremasi PKC dan mengalami beberapa amendemen untuk mencerminkan perubahan sosial dan ekonomi. Di sisi lain, Rusia beralih dari sistem Soviet menuju presidensial-semi presidensial dengan struktur federal yang memberikan otonomi signifikan kepada subjek federal. Meskipun ada kerangka multipartai, kekuatan eksekutif yang kuat, terutama di bawah presiden, tetap mempengaruhi dinamika politik. Perbedaan ini juga tercermin dalam pengembangan administrasi publik, di mana China telah mengalami pertumbuhan pesat dalam kelembagaan dan pencapaian sosial ekonomi sejak awal reformasi ekonominya, sementara Rusia menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan kepentingan ekonomi regional dan transparansi pemerintahan di era pasca-Soviet.

DAFTAR REFERENSI

- Laksono, T. M., Devina, F., & Artikel, H. (2023). Perbandingan Sistem Administrasi Negara Indonesia Dengan Sistem Administrasi Negara China. *Jurnal Ilmiah Riset Dan Pengembangan*, 8(6), 56–67.
- Ma, L., & Wu, J. (2016). Kebangkitan Administrasi Publik di Tiongkok sejak 1978: kekuatan pendorong, masalah dan prospek. *Jurnal Pemerintahan Tiongkok*, 1(1), 51–79. <https://doi.org/10.1080/23812346.2016.1166904>
- Manaev, G. (2019, September 5). Seperti Apa Model Pemerintahan Rusia?
- Rafiqi, I. D. (2022). Perbandingan Konstitusi Negara Indonesia Dan Rusia. *Widya Yuridika*. 5(1), 1. <https://doi.org/10.31328/wy.v5i1.3561>

- Rizqianto, R. (2023). Sistem Pemerintahan Russia Pasca Runtuhnya Uni Soviet. D
- Santoso, B. (2017). Kebangkitan Ekonomi China Dan Pengaruhnya Terhadap Beberapa Negara Di Kawasan Asia. *Global Insight Journal*, 2(1), 227–249.
<https://doi.org/10.52447/gij.v2i1.1657>
- Wati, R., Wati, W., & Hanifa, S. D. (2023). Analisis Perbandingan Administrasi Publik Negara China Dan Rusia. *PENTAHELIX: Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 63–79.
<https://doi.org/10.24853/penta.1.1.63-79>